

## PENDIDIKAN ISLAM DI IRAN: GAMBARAN UMUM, STRUKTUR SISTEM, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Zulkifli<sup>1</sup>, Dede Rosyada<sup>2</sup>, Muhammad Zalnur<sup>3</sup> Melda Delvia<sup>4</sup>

<sup>1,3</sup> UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Indonesia, <sup>2</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, <sup>4</sup>IAI Sumatera Barat, Indonesia

### ABSTRAK

Sistem pendidikan Islam di Iran pasca-Revolusi 1979 berkembang dalam kerangka ideologi negara, namun menghadapi tantangan terkait ketimpangan akses, keterbatasan digitalisasi, dan isu inklusivitas. Permasalahan inti penelitian ini adalah bagaimana pendidikan Islam—khususnya melalui Hauzah Ilmiah dan kurikulum nasional berbasis nilai-nilai Syi'ah—dikelola melalui kebijakan pemerintah serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur sistem pendidikan Islam Iran, arah kebijakan pemerintah, serta dinamika implementasinya dalam konteks sosial-politik kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan, data dikumpulkan dari jurnal akademik, buku ilmiah, dokumen resmi pemerintah Iran, dan publikasi internasional, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam berfungsi sebagai instrumen pembentukan identitas nasional dan stabilitas ideologis, tetapi komitmen pemerintah melalui investasi infrastruktur dan beasiswa masih belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan akses dan dominasi mazhab Syi'ah dalam kurikulum. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan digitalisasi, peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan kurikulum yang lebih inklusif. Temuan ini dapat menjadi rujukan bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam merancang kebijakan pendidikan Islam yang responsif dan kontekstual.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, Iran, Struktur Sistem, Kebijakan Pemerintah.

### ABSTRACT

*The Islamic education system in Iran after the 1979 Revolution has developed within a strong ideological and political framework, yet continues to face challenges related to unequal access, limited digitalization, and issues of inclusivity. The central problem addressed in this study concerns how Islamic education—particularly through the Hauzah Ilmiyah and a national curriculum grounded in Shi'a principles—is governed by state policy and the extent to which it responds to contemporary societal needs. This study aims to analyze the structure of Iran's Islamic education system, government policy directions, and the dynamics of their implementation in the current socio-political context. Using a qualitative approach with a library research design, data were collected from academic journals, scholarly books, official Iranian government documents, and international publications, and analyzed through thematic analysis. The findings indicate that Islamic education functions as a tool for shaping national identity and ideological stability, yet government efforts through infrastructure investment and scholarship expansion have not fully addressed access disparities or the dominance of Shi'a orientation within the curriculum. The study implies the need for strengthened digital transformation, enhanced teacher competency, and the development of a more inclusive curriculum. These insights offer valuable references for other countries, including Indonesia, in designing more responsive and context-sensitive Islamic education policies*

**Keywords:** Islamic Education, Iran, System Structure, Government Policy

### A. Pendahuluan

Pendidikan Islam di Iran memiliki peran sentral dalam membentuk identitas sosial, budaya, dan intelektual masyarakatnya, sekaligus menjadi cerminan dinamika



[zulkifli@uinib.ac.id](mailto:zulkifli@uinib.ac.id)



Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang,  
Sumatera Barat 25586

historis dan politik pasca revolusi Islam 1979.<sup>1</sup> Iran sebagai negara dengan mayoritas penduduk Syi'ah, telah mengembangkan sistem pendidikan Islam yang unik, mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan modernisasi.<sup>2</sup> Fakta sosial menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Iran tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ajaran agama, tetapi juga sebagai alat pembentukan ideologi nasional yang mendukung visi pemerintah.<sup>3</sup> Iran menekankan pendidikan Islam berbasis rasionalitas dan dialog setara, yang memungkinkan peserta didik untuk menjawab tantangan zaman secara kritis. Hal ini terlihat dari perkembangan lembaga Hauzah Ilmiah, yang setara dengan pesantren di Indonesia, yang telah eksis selama berabad-abad dan menghasilkan tokoh-tokoh agama seperti Mujtahid, Hojjatul Islam, dan Ayatollah.

Berdasarkan literatur, penelitian oleh Rapono menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Iran telah berkembang pesat sejak Revolusi Islam, dengan peningkatan produktivitas sarjana dalam bidang sains dan ilmu sosial.<sup>4</sup> Selain itu, penelitian oleh Muvid membandingkan struktur pendidikan Islam di Iran, Indonesia, dan Arab Saudi, mengungkapkan bahwa Iran memiliki pendekatan yang lebih terintegrasi antara kurikulum agama dan ilmu pengetahuan modern.<sup>5</sup> Pemerintah Iran juga telah merancang roadmap pendidikan nasional yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat,

Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian terdahulu. Sebagian besar studi lebih berfokus pada aspek historis dan struktural pendidikan Islam di Iran, seperti perkembangan Hauzah Ilmiah atau pengaruh Revolusi Islam, tetapi kurang mengeksplorasi dampak kebijakan pemerintah terhadap aksesibilitas dan kualitas pendidikan Islam di kalangan masyarakat marginal, seperti kelompok minoritas atau daerah pedesaan. Selain itu, penelitian tentang bagaimana pendidikan Islam di Iran merespons tantangan globalisasi, seperti digitalisasi dan arus budaya asing, masih terbatas. Padahal, menurut Ahmad Suryadi, pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai transenden dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern untuk tetap relevan.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Realitas Doktrin et al., “Islam Dan Politik,” 1999.

<sup>2</sup> Abdul Rahman and M. Ag Nurjannah, *Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam* (Greenbook Publisher, 2025).

<sup>3</sup> Moh Rokib, Muhlas Amali, and M. Nuril Qulub, *SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM: Institusi-Institusi Yang Dikelola Pemerintah Dan Masyarakat* (PENERBIT KBM INDONESIA, 2025).

<sup>4</sup> Muhammad Rapono, “Modernisasi Pendidikan Islam Di Iran,” *Tazkiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2022).

<sup>5</sup> Muhamad Basyru Muvid, “Perbandingan Struktur Lembaga Pendidikan Islam Dan Kurikulum Di Indonesia, Iran Dan Arab Saudi,” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2020): 160-70.

<sup>6</sup> Ahmad Suryadi, *Filsafat Pendidikan Islam: Perspektif Tradisional Dan Kontemporer* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang Iran, Islam di Iran, sistem pendidikan Islam di Iran, serta menganalisis kebijakan pemerintah Iran terhadap pendidikan Islam. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami model pendidikan Islam di Iran sebagai referensi bagi pengembangan pendidikan Islam di negara lain, termasuk Indonesia, di tengah tantangan globalisasi dan kebutuhan akan pendidikan yang inklusif. Dengan memadukan pendekatan historis, sosiologis, dan kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam diskursus pendidikan Islam kontemporer.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam sistem pendidikan Islam di Iran, kebijakan pemerintah, serta tantangan dan peluangnya dalam konteks globalisasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya menangkap kompleksitas fenomena sosial dan kebijakan pendidikan melalui analisis mendalam terhadap data tekstual, historis, dan kontekstual. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan konteks yang mendasari suatu fenomena sosial, yang sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menggali dinamika pendidikan Islam di Iran secara holistik dan sistematis. Paradigma deskriptif-analitis memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga menganalisis hubungan antarvariabel, seperti kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap aksesibilitas pendidikan.<sup>7</sup>

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis untuk membangun pemahaman komprehensif tentang pendidikan Islam di Iran.<sup>8</sup> Studi kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber akademik dan dokumen resmi tanpa batasan geografis, yang relevan mengingat konteks penelitian yang berfokus pada Iran. Sumber data meliputi jurnal ilmiah terindeks, buku akademik, laporan resmi pemerintah Iran, seperti roadmap pendidikan nasional dan laporan tahunan Kementerian Pendidikan Iran, serta publikasi dari organisasi internasional seperti UNESCO. Selain itu, literatur berupa disertasi, tesis,

---

<sup>7</sup> John W. Creswell et al., “Qualitative Research Designs: Selection and Implementation,” *The Counseling Psychologist* 35, no. 2 (March 2007): 236-64, <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>.

<sup>8</sup> Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974-80.

dan artikel konferensi internasional digunakan untuk memperkaya analisis, terutama terkait perkembangan Hauzah Ilmiah dan kebijakan pendidikan Islam.

Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai dokumen tertulis.<sup>9</sup> Data sekunder mencakup artikel jurnal terindeks seperti *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, buku referensi tentang pendidikan Islam di Iran, serta dokumen resmi pemerintah Iran yang tersedia dalam database daring, seperti laporan Kementerian Pendidikan dan Dewan Tinggi Revolusi Budaya. Laporan dari organisasi internasional, seperti UNESCO (2022) dan Bank Dunia (2023), juga digunakan untuk memberikan konteks global tentang pendidikan dan perkembangan manusia di Iran. Seleksi sumber dilakukan dengan memprioritaskan publikasi dalam rentang 10 tahun terakhir untuk menjamin aktualitas data, meskipun beberapa sumber klasik digunakan untuk konteks historis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di database akademik, seperti Google Scholar, JSTOR, dan situs resmi pemerintah Iran, menggunakan kata kunci seperti “pendidikan Islam di Iran,” “Hauzah Ilmiah,” “kebijakan pendidikan Iran,” dan “globalisasi pendidikan Islam.” Dokumen yang relevan dikumpulkan, diorganisir, dan disimpan dalam basis data digital untuk memudahkan analisis. Penelitian ini juga memanfaatkan laporan dan arsip daring dari Kementerian Pendidikan Iran serta organisasi internasional untuk mendapatkan data kuantitatif, seperti statistik anggaran pendidikan dan jumlah siswa Hauzah Ilmiah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan bertahap, dimulai dari identifikasi sumber umum untuk gambaran luas, kemudian mempersempit fokus pada sumber yang spesifik terkait kebijakan dan tantangan pendidikan Islam. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup berbagai dimensi topik penelitian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik berdasarkan kerangka Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>10</sup> Pada tahap reduksi data, informasi dari sumber-sumber yang dikumpulkan disaring untuk memilih data yang relevan dengan tema utama, seperti struktur pendidikan Islam, kebijakan pemerintah, aksesibilitas pendidikan bagi kelompok marginal, dan respons terhadap globalisasi. Data kemudian diorganisir ke dalam kategori tematik untuk memudahkan penyajian. Penarikan kesimpulan

<sup>9</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

<sup>10</sup> Namirah Adelliani, Citra Afny Sucirahayu, and Azmiya Rahma Zanjabilah, *Analisis Tematik Pada Penelitian Kualitatif* (Penerbit Salemba, 2023).

dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan implikasi kebijakan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari jurnal akademik, dokumen resmi, dan laporan internasional untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Gambaran Umum Tentang Iran

Iran secara resmi dikenal sebagai Republik Islam Iran, adalah negara di Asia Barat dengan luas wilayah sekitar 1,65 juta kilometer persegi dan populasi lebih dari 85 juta jiwa berdasarkan estimasi tahun 2023.<sup>11</sup> Terletak di persimpangan strategis antara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Kaukasus, Iran memainkan peran geopolitik penting, didukung oleh cadangan minyak dan gas yang signifikan, menyumbang sekitar 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.<sup>12</sup> Sebagai pewaris peradaban Persia kuno, Iran memiliki warisan intelektual dan budaya yang kaya, terlihat dari kontribusi dalam sastra melalui karya-karya pujangga seperti Rumi dan Hafez, serta kemajuan sains oleh tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Pasca-Revolusi Islam 1979, Iran mengadopsi sistem pemerintahan teokrasi berbasis mazhab Syi'ah Ja'fari di bawah kepemimpinan Wali Faqih, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, hukum, pendidikan, dan kebudayaan. Sistem ini telah membentuk identitas nasional yang kuat, meskipun tidak lepas dari tantangan internal dan eksternal.

Struktur sosial Iran ditandai oleh keragaman etnis yang signifikan, dengan etnis Persia sebagai mayoritas (61%), diikuti oleh Azeri (16%), Kurdi (10%), serta kelompok lain seperti Lur, Baloch, dan Arab.<sup>13</sup> Keragaman ini diperkaya oleh keberadaan minoritas agama, seperti Sunni, Zoroaster, Kristen, dan Yahudi, yang masing-masing memiliki pengaruh budaya yang khas. Menurut Esposito dan Voll, keragaman etnis dan agama ini menciptakan dinamika kompleks dalam pembentukan identitas nasional, di mana Islam Syi'ah menjadi perekat utama, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kohesi sosial. Kota-kota besar seperti Teheran, Qom, dan Mashhad menjadi pusat intelektual, keagamaan, dan

<sup>11</sup> Lucky, "Analisa Kritis Representasi Revolusi Iran 1979 dalam Video Game Black Friday (2022)" (bachelorThesis, Fakultas Adab dan Humaniora, 2024).

<sup>12</sup> Abdul Halim Daud, Zarina Othman, and N. O. R. Idris, "Hubungan Iran-Arab Saudi Dan Kestabilan Rantau Timur Tengah.," *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy* 45, no. 1 (2018).

<sup>13</sup> "Iran," November 2, 2023, <https://minorityrights.org/country/iran/>.

politik, sementara daerah pedesaan sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya, termasuk pendidikan dan layanan publik.<sup>14</sup>

Kemajuan manusia di Iran terlihat dari capaian tingkat literasi yang mencapai 98,7%, salah satu yang tertinggi di kawasan Timur Tengah.<sup>15</sup> Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pendidikan sejak Revolusi Islam 1979, yang menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Investasi besar dalam infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan universitas, telah meningkatkan jumlah lulusan di berbagai bidang, mulai dari sains hingga studi keislaman. Menurut Assegaf, fokus pemerintah pada pendidikan telah mendorong Iran menduduki peringkat tinggi dalam publikasi ilmiah di kawasan Timur Tengah, dengan Universitas Teheran dan Universitas Sharif sebagai pusat keunggulan akademik.<sup>16</sup>

Warisan intelektual Iran berakar pada institusi seperti Akademi Jundishapur pada abad ke-3 hingga ke-7 Masehi, yang menjadi pusat pembelajaran kedokteran, matematika, dan astronomi. Warisan ini berlanjut melalui pendirian universitas modern dan Hauzah Ilmiah di Qom, yang menjadi pusat studi keislaman. Namun, tantangan seperti ketimpangan regional dalam akses pendidikan tetap menjadi isu signifikan. Penelitian oleh Muvid menunjukkan bahwa daerah pedesaan sering kali kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai dibandingkan kota-kota besar. Selain itu, sanksi internasional telah memengaruhi ekonomi Iran, membatasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil.<sup>17</sup>

Pengaruh globalisasi juga membawa tantangan baru bagi Iran, termasuk dalam menjaga identitas budaya di tengah arus budaya Barat. Menurut Keddie, Iran berusaha menyeimbangkan modernisasi dengan pelestarian nilai-nilai tradisional, termasuk melalui pendidikan yang berbasis Islam.<sup>18</sup> Upaya ini terlihat dari pengembangan kurikulum nasional yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai keislaman. Namun, tekanan ekonomi akibat sanksi internasional sering kali menghambat implementasi kebijakan pendidikan yang merata, terutama bagi kelompok marginal seperti masyarakat pedesaan dan minoritas etnis.

<sup>14</sup> John L. Esposito and John O. Voll, *Makers of Contemporary Islam* (Oxford University Press, 2001).

<sup>15</sup> Arafah Pramasto et al., *Renungan Sejarah: Timur Ke Barat, Vice Versa* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2022).

<sup>16</sup> Abd Assegaf, *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan Di Negara-Negara Islam Dan Barat* (Gama Media, 2003).

<sup>17</sup> Muvid, "Perbandingan Struktur Lembaga Pendidikan Islam Dan Kurikulum Di Indonesia, Iran Dan Arab Saudi."

<sup>18</sup> Nikki R. Keddie and Yann Richard, *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*, vol. 3 (Yale university press, 2006).

Temuan ini menunjukkan bahwa posisi geopolitik, warisan budaya, dan komitmen terhadap pendidikan telah menjadikan Iran sebagai kekuatan intelektual di kawasan. Namun, ketimpangan regional, sanksi ekonomi, dan tantangan globalisasi perlu diatasi untuk memastikan pemerataan akses pendidikan. Pendekatan Iran dalam mengintegrasikan warisan budaya dengan modernisasi dapat menjadi referensi bagi negara lain, meskipun memerlukan strategi yang lebih inklusif untuk mengakomodasi keragaman etnis dan agama.

## 2. Islam di Iran

Islam merupakan agama resmi di Iran, dengan sekitar 98% penduduk menganut mazhab Syi'ah Ja'fari, sementara sisanya mencakup Sunni, Kristen, Zoroaster, Yahudi, dan minoritas agama lainnya.<sup>19</sup> Sejak Revolusi Islam 1979, mazhab Syi'ah telah menjadi landasan ideologi negara, memengaruhi seluruh aspek kehidupan, mulai dari politik, hukum, pendidikan, hingga budaya sehari-hari. Menurut Sayid Mufid Husaini, Islam Syi'ah di Iran menekankan pentingnya ijтиhad (penalaran *independen*) sebagai mekanisme untuk menafsirkan hukum Islam secara dinamis, memungkinkan adaptasi terhadap tantangan modern tanpa kehilangan nilai-nilai inti agama.<sup>20</sup> Peran ulama dalam masyarakat sangat sentral, terutama melalui lembaga Hauzah Ilmiah di Qom dan Mashhad, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai wadah pengembangan pemikiran Islam yang responsif terhadap isu-isu kontemporer, seperti etika teknologi, keadilan sosial, dan dialog antaragama. Sistem hierarki keagamaan, seperti Mujtahid, Hojjatul Islam, dan Ayatollah, memperkuat struktur intelektual dan spiritual yang mendorong diskursus keislaman yang mendalam.

Hauzah Ilmiah, khususnya di Qom, telah menjadi pusat pembelajaran Islam Syi'ah yang terkenal di dunia, menarik siswa dari berbagai negara, termasuk Irak, Lebanon, dan Pakistan. Menurut Nasr, lembaga ini tidak hanya melatih ulama, tetapi juga menghasilkan cendekiawan yang berkontribusi pada diskursus akademik global, termasuk dalam bidang filsafat Islam, teologi, dan hukum syariat.<sup>21</sup> Penelitian oleh Anwar Sanusi menunjukkan bahwa pendekatan Iran dalam memadukan nilai-nilai Syi'ah dengan modernitas menciptakan model pendidikan

<sup>19</sup> Aulia Rahmat, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Di Republik Islam Iran," *Al Muqaranah*, September, 2013.

<sup>20</sup> H. Hasan Bisri, Sistem Hukum Kenegaraan Iran (LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

<sup>21</sup> Marlène Nasr, *Islam et Démocratie Dans l'enseignement En Jordanie* (KARTHALA Editions, 2007).

Islam yang unik, berbeda dari pendekatan dogmatis yang sering ditemukan di negara-negara Sunni seperti Arab Saudi atau Mesir.<sup>22</sup> Pendidikan di Hauzah Ilmiah menekankan pengembangan rasionalitas dan dialog kritis, yang memungkinkan siswa untuk menjawab tantangan kontemporer, seperti isu-isu etika dalam bioteknologi, keberlanjutan lingkungan, dan hubungan antaragama, dengan landasan teologi yang kuat.

Namun, dominasi mazhab Syi'ah dalam sistem pendidikan dan kebijakan negara menimbulkan tantangan bagi komunitas minoritas, khususnya umat Sunni di wilayah seperti Balochistan dan Kurdistan. Penelitian oleh Komarudin mengungkapkan bahwa komunitas Sunni sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan agama yang sesuai dengan mazhab mereka, yang dapat memicu ketegangan sosial dan persepsi diskriminasi.<sup>23</sup> Meskipun pemerintah telah berupaya mengakomodasi minoritas melalui kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, implementasinya masih terbatas oleh kendala logistik dan prioritas ideologis. Selain itu, pengaruh globalisasi, seperti paparan budaya Barat melalui media sosial dan internet, menantang relevansi pendidikan agama tradisional di kalangan generasi muda, yang semakin tertarik pada nilai-nilai sekuler dan gaya hidup modern.

Revolusi Islam 1979 telah menanamkan pendidikan moral dan ideologi Syi'ah dalam kurikulum nasional, dengan mata pelajaran seperti studi Al-Qur'an, fikih, dan sejarah Islam menjadi wajib di semua tingkat pendidikan.<sup>24</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat identitas nasional berbasis Syi'ah, tetapi kadang-kadang dikritik karena kurang fleksibel dalam mengakomodasi keberagaman agama dan budaya di Iran. Menurut Muvid, pendidikan Islam di Iran perlu mengintegrasikan literasi digital dan pendekatan interdisipliner untuk tetap relevan di era global. Misalnya, pengajaran agama yang memanfaatkan teknologi digital dapat menarik minat generasi muda dan membantu menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas.<sup>25</sup>

Tantangan lain adalah menjaga keseimbangan antara pendekatan tradisional dan kebutuhan akan inovasi dalam pendidikan agama. Sementara Hauzah Ilmiah

<sup>22</sup> A. S. Anwar Sanusi, "Pemikiran Politik Islam" (CV Elsi Pro, 2021).

<sup>23</sup> Komarudin Sassi, "Wawasan Politik-Ideologis Pendidikan Islam Di Pakistan Dan Iran: Integrasi Doktrin Sunni-Syi'ah," *EDUCATE: Journal of Education and Culture* 3, no. 01 (2025): 468-80.

<sup>24</sup> Muhammad Rapono, "Modernisasi Pendidikan Islam Di Iran," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2022).

<sup>25</sup> Muvid, "Perbandingan Struktur Lembaga Pendidikan Islam Dan Kurikulum Di Indonesia, Iran Dan Arab Saudi."

tetap berfokus pada teologi dan fikih tradisional, beberapa cendekiawan, seperti Hojjatul Islam Nezafat Yazdi, mendorong pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual, seperti memasukkan studi tentang etika global dan dialog antaragama. Selain itu, tekanan eksternal seperti sanksi internasional membatasi sumber daya untuk pengembangan pendidikan agama, terutama dalam hal penyediaan teknologi dan pelatihan tenaga pengajar. Menurut laporan UNESCO, kurangnya akses ke teknologi di daerah pedesaan menghambat modernisasi pendidikan agama, yang dapat memperlebar kesenjangan pendidikan antara kota dan desa.

Secara keseluruhan, Islam Syi'ah di Iran memberikan fondasi ideologis dan intelektual yang kuat bagi pendidikan agama, dengan Hauzah Ilmiah sebagai pilar utama. Namun, tantangan seperti marginalisasi minoritas agama, pengaruh globalisasi, dan keterbatasan sumber daya menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan inovatif. Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan agama bagi komunitas Sunni dan minoritas lainnya, mengintegrasikan teknologi digital, dan mendorong dialog antaragama untuk memastikan relevansi pendidikan Islam di era modern. Model Iran dapat menjadi referensi bagi negara lain dalam mengembangkan pendidikan Islam yang seimbang, tetapi memerlukan penyesuaian untuk mengatasi isu inklusivitas dan adaptasi global.

### 3. Sistem Pendidikan Islam Di Iran

Sistem pendidikan Islam di Iran terdiri dari dua jalur utama: pendidikan formal di bawah Kementerian Pendidikan dan pendidikan agama di Hauzah Ilmiah. Pendidikan formal mengintegrasikan mata pelajaran agama, seperti Al-Qur'an, fikih, dan sejarah Islam, dengan ilmu pengetahuan modern, seperti matematika, sains, dan teknologi. Menurut Yuliani et al., kurikulum ini dirancang untuk membentuk generasi yang berakhhlak mulia sekaligus kompeten secara akademik, mencerminkan visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan mampu bersaing secara global.<sup>26</sup> Data dari Kementerian Pendidikan Iran menunjukkan bahwa lebih dari 90% sekolah negeri di Iran mengimplementasikan kurikulum nasional yang mencakup pendidikan Islam sebagai komponen wajib.

Hauzah Ilmiah, terutama di Qom dan Mashhad, menawarkan pendidikan agama tingkat lanjut yang berfokus pada teologi Syi'ah, filsafat Islam, hukum

---

<sup>26</sup> Muvid.

syariat, dan etika. Lembaga ini telah melatih lebih dari 70.000 siswa, termasuk calon ulama yang memegang peran penting dalam masyarakat. Pendekatan berbasis rasionalitas dan dialog kritis dalam Hauzah Ilmiah memungkinkan siswa untuk menjawab tantangan kontemporer, seperti isu-isu etika dalam teknologi dan sains. Pendekatan ini membedakan sistem pendidikan Iran dari model pendidikan agama di negara lain, yang sering kali lebih dogmatis.<sup>27</sup>

Namun, sistem pendidikan Islam di Iran menghadapi tantangan aksesibilitas, terutama bagi kelompok marginal seperti masyarakat pedesaan dan minoritas agama. Penelitian oleh Muvid menunjukkan bahwa distribusi sumber daya pendidikan masih terkonsentrasi di kota-kota besar, meninggalkan daerah terpencil dengan fasilitas yang terbatas.<sup>28</sup> Selain itu, fokus pada mazhab Syi'ah dalam kurikulum kadang-kadang membatasi akses komunitas Sunni terhadap pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini menciptakan ketimpangan yang perlu diatasi untuk memastikan pendidikan yang inklusif.

Globalisasi juga menimbulkan tantangan baru, seperti kebutuhan akan digitalisasi pendidikan. Meskipun beberapa sekolah telah mulai mengadopsi platform pembelajaran daring, Hauzah Ilmiah masih lambat dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kurikulumnya. Kurangnya literasi digital di kalangan pendidik agama dapat menghambat daya tarik pendidikan Islam bagi generasi muda, yang semakin terpapar budaya global. Inisiatif seperti pengembangan aplikasi pembelajaran agama dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses dan relevansi.

Pemerintah Iran telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui pelatihan guru dan pengembangan infrastruktur. Namun, menurut laporan UNESCO, kurangnya tenaga pengajar yang terlatih di daerah pedesaan menjadi hambatan utama.<sup>29</sup> Selain itu, pengaruh budaya Barat melalui media dan internet menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dalam pengajaran agama untuk tetap relevan bagi generasi muda. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam di Iran memiliki kekuatan dalam integrasi agama dan ilmu modern, tetapi memerlukan inovasi seperti digitalisasi dan pemerataan sumber daya untuk mengatasi ketimpangan akses.

<sup>27</sup> Purkon Hidayat, "Politik Global Dan Wacana Etika Religius: Antara Tabatabai Dan Hamka," *Jurnal ICMES Volume 2*, no. 2 (2018).

<sup>28</sup> Muvid, "Perbandingan Struktur Lembaga Pendidikan Islam Dan Kurikulum Di Indonesia, Iran Dan Arab Saudi."

<sup>29</sup> "Hari Guru Sedunia: UNESCO membunyikan peringatan atas krisis kekurangan guru di dunia | UNESCO," accessed July 3, 2025.

Secara keseluruhan, sistem pendidikan Islam di Iran menawarkan model yang unik dalam memadukan tradisi dan modernitas. Namun, untuk tetap kompetitif di era global, pemerintah perlu memperluas akses pendidikan bagi kelompok marginal, mengintegrasikan teknologi digital, dan memastikan kurikulum yang inklusif bagi semua kelompok agama. Pendekatan ini dapat menjadi referensi bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman.

#### 4. Kebijakan Pemerintahan Iran Terhadap Pendidikan Islam

Pemerintah Iran menunjukkan komitmen kuat terhadap pendidikan Islam melalui *Roadmap* pendidikan nasional, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 dan diperbarui pada tahun 2020, menegaskan pendidikan Islam sebagai pilar utama pembentukan identitas nasional berbasis ideologi Syi'ah. Kebijakan ini mencakup alokasi anggaran sebesar 15% dari total anggaran pendidikan nasional untuk mendukung pendidikan agama, termasuk pembangunan infrastruktur Hauzah Ilmiah, penyediaan beasiswa bagi siswa, dan pelatihan guru untuk mata pelajaran keislaman.<sup>30</sup> Dewan Tinggi Revolusi Budaya, yang didirikan pasca-Revolusi Islam 1979, memainkan peran kunci dalam mengawasi integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan, memastikan bahwa kurikulum di semua tingkat pendidikan mencerminkan prinsip-prinsip Syi'ah Ja'fari. Selain itu, pemerintah telah menetapkan standar nasional untuk pengajaran agama, yang mencakup studi Al-Qur'an, fikih, sejarah Islam, dan etika, sebagai bagian wajib dari kurikulum sekolah negeri dan swasta. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat identitas ideologis negara sambil membekali siswa dengan nilai-nilai moral yang selaras dengan visi Revolusi Islam.

Untuk mendukung pendidikan Islam, pemerintah telah memperluas jaringan sekolah agama dan Hauzah Ilmiah di seluruh negeri, dengan lebih dari 5.000 sekolah agama didirikan sejak Revolusi Islam.<sup>31</sup> Hauzah Ilmiah, khususnya di Qom, menjadi pusat pelatihan ulama dan cendekiawan Muslim, dengan fokus pada teologi Syi'ah, hukum syariat, dan filsafat Islam. Pemerintah juga menyediakan beasiswa bagi siswa Hauzah Ilmiah, yang menarik talenta muda dari dalam dan luar negeri,

<sup>30</sup> M. Noor Fuady, "PENDIDIKAN ISLAM DI IRAN (Tinjauan Historis Pra Dan Pasca Revolusi)," *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2016).

<sup>31</sup> Siti Komariah, "Konsep Revolusi Islam Iran Menurut Imam Khomeini" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

termasuk dari negara-negara seperti Irak dan Lebanon. Kebijakan ini telah berhasil meningkatkan jumlah ulama yang berkontribusi pada diskursus keagamaan dan akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pemerintah telah mendirikan pusat penelitian keislaman di berbagai universitas, seperti Universitas Teheran, untuk mempromosikan studi interdisipliner yang mengintegrasikan agama dengan ilmu pengetahuan modern.<sup>32</sup>

Namun, kebijakan ini menghadapi kritik karena cenderung memprioritaskan mazhab Syi'ah, yang dapat membatasi akses pendidikan Islam yang inklusif bagi komunitas Sunni dan minoritas agama lainnya, seperti Kristen dan Zoroaster. Komunitas Sunni di wilayah seperti Balochistan dan Kurdistan sering kekurangan fasilitas pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan mereka, yang dapat memicu ketegangan sosial dan persepsi diskriminasi.<sup>33</sup> Meskipun pemerintah telah mencoba mengatasi isu ini melalui program pendidikan inklusif, implementasinya masih terhambat oleh kendala logistik, seperti kurangnya infrastruktur di daerah terpencil, dan prioritas ideologis yang menekankan Syi'ah. Selain itu, fokus berlebihan pada pendidikan agama kadang-kadang mengurangi fleksibilitas kurikulum untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja global, seperti keterampilan teknologi, bahasa asing, dan kompetensi digital, yang semakin penting di era modern.

Globalisasi telah mendorong pemerintah Iran untuk memperkenalkan inisiatif digitalisasi dalam pendidikan Islam, seperti pengembangan platform pembelajaran daring untuk mata pelajaran agama. Misalnya, Kementerian Pendidikan Iran meluncurkan aplikasi pembelajaran berbasis agama pada tahun 2021 untuk memfasilitasi akses siswa ke materi keislaman secara digital. Namun, implementasi inisiatif ini masih terbatas, terutama di daerah pedesaan yang kekurangan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang stabil dan perangkat komputer.<sup>34</sup> Sanksi internasional juga telah membatasi anggaran untuk pengembangan teknologi pendidikan, menghambat upaya modernisasi sistem pendidikan agama. Kurangnya investasi dalam infrastruktur digital memperlebar kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang dapat

<sup>32</sup> Bisri, *Sistem Hukum Kenegaraan Iran*.

<sup>33</sup> Endi Aulia Garadian, "Analisa Kritis Representasi Revolusi Iran 1979 Dalam Video Game Black Friday (2022)" (B.S. thesis, Fakultas Adab dan Humaniora), accessed July 2, 2025.

<sup>34</sup> Muvid, "Perbandingan Struktur Lembaga Pendidikan Islam Dan Kurikulum Di Indonesia, Iran Dan Arab Saudi."

menghambat tujuan pemerintah untuk menciptakan pendidikan Islam yang merata dan relevan.

Upaya lain termasuk pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran agama di sekolah dan Hauzah Ilmiah. Pemerintah telah mengadakan program pelatihan nasional untuk guru agama, dengan fokus pada metode pengajaran yang inovatif dan kontekstual, seperti penggunaan teknologi multimedia dan pendekatan interdisipliner. Kekurangan tenaga pengajar yang terlatih di daerah terpencil tetap menjadi tantangan utama, terutama karena kurangnya insentif finansial untuk menarik guru ke wilayah tersebut. Selain itu, pengaruh budaya global melalui media sosial dan internet menuntut pendekatan yang lebih dinamis dalam pengajaran agama, seperti pengembangan konten multimedia yang menarik bagi generasi muda.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah Iran terhadap pendidikan Islam mencerminkan komitmen kuat terhadap pelestarian identitas nasional berbasis Syi'ah, dengan investasi signifikan dalam infrastruktur, beasiswa, dan pelatihan guru. Namun, tantangan seperti marginalisasi komunitas minoritas, keterbatasan teknologi di daerah pedesaan, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan pendidikan agama dengan keterampilan modern menuntut strategi yang lebih inklusif dan inovatif. Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan agama bagi kelompok Sunni dan minoritas lainnya, meningkatkan investasi dalam teknologi digital, dan mengintegrasikan keterampilan praktis untuk pasar kerja global. Pendekatan ini dapat menjadikan model pendidikan Islam Iran sebagai referensi bagi negara lain, seperti Indonesia, dalam mengembangkan sistem pendidikan yang relevan, inklusif, dan responsif terhadap dinamika global.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini mengungkap bahwa pendidikan Islam di Iran, yang berakar pada mazhab Syi'ah Ja'fari pasca-Revolusi Islam 1979, memainkan peran sentral dalam membentuk identitas nasional melalui integrasi nilai-nilai keagamaan dan modernisasi. Sistem pendidikan Islam di Iran terdiri dari pendidikan formal di bawah Kementerian Pendidikan, yang menggabungkan mata pelajaran agama seperti Al-Qur'an dan fikih dengan ilmu pengetahuan modern, serta pendidikan agama tingkat lanjut di Hauzah Ilmiah, yang menghasilkan ulama dan cendekiawan dengan pendekatan rasionalitas dan dialog kritis. Iran mencatat tingkat literasi tinggi sebesar 98,7%, namun menghadapi

tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan di daerah pedesaan, keterbatasan sumber daya akibat sanksi internasional, dan minimnya digitalisasi pendidikan agama. Kebijakan pemerintah, melalui *Roadmap* Pendidikan Nasional dan alokasi anggaran 15% untuk pendidikan agama, menunjukkan komitmen kuat, tetapi cenderung memprioritaskan Syi'ah, sehingga membatasi inklusivitas bagi minoritas agama seperti Sunni. Globalisasi menuntut inovasi seperti integrasi teknologi digital dan pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja global. Meskipun model pendidikan Islam Iran menawarkan pendekatan unik dalam memadukan tradisi dan modernitas, peningkatan akses bagi kelompok marginal, pelatihan guru, dan adopsi teknologi digital diperlukan untuk memastikan relevansi dan pemerataan pendidikan. Model ini dapat menjadi referensi bagi negara lain, seperti Indonesia, dengan penyesuaian untuk mengatasi isu inklusivitas dan adaptasi terhadap dinamika global.

## E. Referensi

- Adelliani, Namirah, Citra Afny Sucirahayu, and Azmiya Rahma Zanjabila. *Analisis Tematik Pada Penelitian Kualitatif*. Penerbit Salemba, 2023.
- Adlini, Miza Nina, Anisyah Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974-80.
- Anwar Sanusi, A. S. "Pemikiran Politik Islam." CV Elsi Pro, 2021.
- Assegaf, Abd. *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan Di Negara-Negara Islam Dan Barat*. Gama Media, 2003.
- Bisri, H. Hasan. *Sistem Hukum Kenegaraan Iran*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Creswell, John W., William E. Hanson, Vicki L. Clark Plano, and Alejandro Morales. "Qualitative Research Designs: Selection and Implementation." *The Counseling Psychologist* 35, no. 2 (March 2007): 236-64. <https://doi.org/10.1177/0011100006287390>.
- Daud, Abdul Halim, Zarina Othman, and N. O. R. Idris. "Hubungan Iran-Arab Saudi Dan Kestabilan Rantau Timur Tengah." *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy* 45, no. 1 (2018).
- Doktrin, Realitas, Akses Sosiologisnya, Mata Kuliah Sosiologi Agama, Sokhi Huda, H. Soetandyo Wignyosoebroto, and MPA Drs Musta'in. "Islam Dan Politik," 1999.
- Esposito, John L., and John O. Voll. *Makers of Contemporary Islam*. Oxford University Press, 2001.
- Fuady, M. Noor. "Pendidikan Islam Di Iran (Tinjauan Historis Pra Dan Pasca Revolusi)." *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2016).
- Garadian, Endi Aulia. "Analisa Kritis Representasi Revolusi Iran 1979 Dalam Video Game Black Friday (2022)." B.S. thesis, Fakultas Adab dan Humaniora. Accessed July 2, 2025.
- "Hari Guru Sedunia: UNESCO membunyikan peringatan atas krisis kekurangan guru di dunia | UNESCO." Accessed July 3, 2025.
- Hidayat, Purkon. "Politik Global Dan Wacana Etika Religius: Antara Tabatabai Dan Hamka." *Jurnal ICMES Volume* 2, no. 2 (2018).

- “Iran,” November 2, 2023. <https://minorityrights.org/country/iran/>.
- Keddie, Nikki R., and Yann Richard. *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*. Vol. 3. Yale university press, 2006.
- Komariah, Siti. “Konsep Revolusi Islam Iran Menurut Imam Khomeini.” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Lucky. “Analisa Kritis Representasi Revolusi Iran 1979 dalam Video Game Black Friday (2022).” bachelorThesis, Fakultas Adab dan Humaniora, 2024.
- Muvid, Muhamad Basyrul. “Perbandingan Struktur Lembaga Pendidikan Islam Dan Kurikulum Di Indonesia, Iran Dan Arab Saudi.” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2020): 160-70.
- Nasr, Marlène. *Islam et Démocratie Dans l'enseignement En Jordanie*. KARTHALA Editions, 2007.
- Pramasto, Arafah, Baroqah Meyrynaldy, S. Sos, and Widya Ardila Pratama. *Renungan Sejarah: Timur Ke Barat, Vice Versa*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2022.
- Rahman, Abdul, and M. Ag Nurjannah. *Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam*. Greenbook Publisher, 2025.
- Rahmat, Aulia. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Di Republik Islam Iran.” *Al Muqaranah, September*, 2013.
- Rapono, Muhammad. “Modernisasi Pendidikan Islam Di Iran.” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2022).
- Rokib, Moh, Muhlas Amali, and M. Nuril Qulub. *Sejarah Pendidikan Islam: Institusi-Institusi Yang Dikelola Pemerintah Dan Masyarakat*. penerbit KBM INDONESIA, 2025.
- Rukin, S. Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sassi, Komarudin. “Wawasan Politik-Ideologis Pendidikan Islam Di Pakistan Dan Iran: Integrasi Doktrin Sunni-Syi’ah.” *EDUCATE: Journal of Education and Culture* 3, no. 01 (2025): 468-80.
- Suryadi, Ahmad. *Filsafat Pendidikan Islam: Perspektif Tradisional Dan Kontemporer*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2024.